

EXPOSE MEDIA

MERAWAT AKAL SEHAT

EDISI JUM'AT, 6 NOVEMBER 2020

www.exposemedia.id

Kristen Stewart
**Jadi Lesbian
Sejak Umur
21 Tahun**



**KPK : Cukong Pilkada
82,3 Persen Danai Pasyon**

halaman 5



**Hariyanto: Pasyon yang
Terbukti Politik Uang
Bakal Didiskualifikasi**

halaman 8

Puji Tuhan, Dana Lansia Cair Pekan Depan

Warga: Terima Kasih Walikota GSVL, Semoga Terus Diberkati

BERITA UTAMA

Puji Tuhan, Dana Lansia Cair Pekan Depan

Warga: Terima Kasih Walikota GSVL, Semoga Terus Diberkati

EXPOSEMEDIA, MANADO — Kabar baik untuk kaum lansia. Dana yang sempat tertunda pembayarannya karena tidak dibahasnya APBDP 2020, bisa terealisasi.



Lewat kebijakan populisnya, Walikota GSVL mampu menjawab semua keresahan para lansia yang sudah sekian lama menanti kejelasan nasib mereka yang tengah menunggu uluran tangan pemerintah.

Rencananya, pencairan dana lansia tersebut akan mulai dibayarkan pada Senin (9/11) pekan depan.

"Komitmen kami untuk tetap menyalurkan dana lansia lanjutan akan dilakukan pekan depan. Penyaluran akan dimulai di sejumlah kelurahan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19," ujar Walikota Manado, GS Vicky Lumentut.

Kabar segera dibayarkannya dana lansia tahap lanjutan itu disambut penuh suka cita oleh para lansia.

Martinus Mansoora, salah satunya. Lansia penerima di Kelurahan Perka-

mil ini mengatakan, kebijakan strategis yang dilakukan walikota begitu membantu masyarakat, terutama kaum lansia yang tengah berjuang melawan pandemi Covid 19.

"Puji Tuhan, ini adalah perbuatan kemanusiaan yang patut kami apresiasi. Kami doakan walikota akan diberkati Tuhan," harap Martinus.

Martinus menambahkan, rakyat saat ini butuh kerja nyata yang dilakukan oleh pemimpin dan bukan lagi diper-hadapkan pada persoalan ke-pentingan politik jelang Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

"Jujur kami butuh makan dan minum. Kami bersyukur dalam situasi seperti ini, pak Walikota ikut memberikan perhatian serius kepada kami," terang pria yang kesehariannya sebagai buruh bangunan ini. (ale/*)



torang Bacoblos

dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19



CEP-Sehan Paripurna di Debat

EXPOSEMEDIA, MANADO – Debat kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Sulut berlangsung spektakuler, Kamis (05/11) sore kemarin.

Debat publik yang digelar di Makatete Desa Warembugan Kecamatan Tombari, Minahasa itu mengupas tuntas tema Penanganan, Pencegahan, dan Pengendalian Corona Virus Desaease 2019 (Covid 19), Serta Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Bencana Alam, Wilayah, dan Infrastruktur Daerah.

Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 1 Christiany Eugenia Paruntu dan Sehan Salim Landjar (SSL) tampil memukau.

Duet pancasila ini secara prima mengulas visi misi, program dan rencana aksi wujudkan Sulut bangkit. Keunggulan CEP-SSL makin nampak saat menyampaikan argumentasi dan jawaban yang paripurna atas pertanyaan yang dilontarkan dua rivalitasnya.

Pantauan Exposemedia, dalam lima sesi debat CEP-Sehan

piawai. Apalagi keduanya punya pengalaman 10 tahun menjadi kepala daerah di wilayah masing-masing.

Di babak akhir closing statement, duet orang baik itu menyentil strategi penyelesaian persoalan kesehatan, bencana alam, dan pengendalian covid 19 di Sulut, dengan 4C.

"Cepat koordinasi, Cepat integrasi, Cepat sinkronisasi, dan akhirnya cepat sistemisasi. Ini tentunya menjadi harapan kami, dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat sulut yang memegang hak kedaulatan, memegang hak pilih, kami ucapkan terima kasih biar berbedabeda tapi tetap satu. Dan jangan lupa pada tanggal 09 Desember 2020, urut memilih pasangan CEP-SEHAN, coblos nomor urut 1," tukas keduanya. (dou/*)



Fatoni Apresiasi KPU Usung Tema C-19

EXPOSEMEDIA, MANADO — Gubernur Sulawesi Utara Agus Fatoni mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut yang sukses menyelenggarakan debat publik perdana Pilgub Sulut 2020 dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Debat publik yang diikuti tiga pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut ini berlangsung di Makatete Hills, Kabupaten Minahasa, Kamis (5/11).

Ketiga paslon tersebut yaitu, Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar, Vonnice Anneke Panambunan-Hendry

Runtuwene, dan Oly Dondokambey-Steven O.E. Kandou.

"Apresiasi atas penyelenggaraan debat oleh KPU yang sudah menyelenggarakan kegiatan debat cakada yang dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan dan juga kegiatan ini di-lakukan di lokasi yang terbuka," katanya.

Diketahui, tema yang diangkat dalam debat perdana ini adalah kesehatan masyarakat, pencegahan bencana alam, pengembangan wilayah, infrastruktur daerah, serta penanganan pencegahan, dan pengendalian Covid-19.

"Terima kasih karena sudah mengkomodir materi debat terkait dengan pena-nganan Covid-19 dan dam-pak sosial ekonominya," ungkapnya.

Debat publik ini juga disiarkan langsung lewat streaming akun resmi KPU Sulut di Youtube dan Facebook sehingga masyarakat dapat mengikuti jalannya debat dimanapun berada sekaligus menghindari kerumunan selain tetap memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan sesuai protokol kesehatan Covid-19. (humas/*)



Lantik Satgas Covid 19, GSVL Ingatkan Disiplin 4 M

EXPOSEMEDIA, MANADO — Walikota Manado, GS Vicky Lumentut, Kamis (5/11) kemarin melantik Satgas Covid-19 tingkat lingkungan di 7 Kelurahan yang ada di Kecamatan Sario, dengan tugas membantu Satgas Covid-19 Kota Manado dalam rangka memutus mata rantai Covid-19.

Tugas Satgas Covid-19 Lingkungan nantinya memberikan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan serta melakukan pemantauan dilingkungan memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik oleh warga.

Walikota menyampaikan sangat penting selalu mengingatkan kepada rakyat Kota Manado bahaya penularan Covid-19.

"Maka dari itu saya rutin turun lapangan menyampaikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar disiplin menjalankan 4M, dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan

menjauhi kerumunan dan yang penting tingkatkan iman dan ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa," terangnya.

Walikota juga tak lupa mengucapkan terimakasih atas partisipasi petugas Satgas Covid-19 Lingkungan se-Kecamatan Sario.

"Terimakasih telah bersedia menjadi bagian dalam tugas mulia ini, sebagai Satgas Covid-19 di Lingkungan dalam mengedukasi dan mensosialisasikan protokol kesehatan dilingkungan masing-masing serta memonitoring warga menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan disiplin," tutup orang nomor satu di Kota Manado ini. (ale*)



KPK : Cukong Pilkada 82,3 Persen Danai Paslon

EXPOSEMEDIA, MANADO — Hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2018 menyebutkan ada donatur yang membiayai peserta pemilihan kepala daerah (pilkada).



Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango

"Hasil survei KPK di tahun 2018 menunjukkan sebanyak 82,3 persen dari calon kepala daerah (cakada) yang diwawancarai menyatakan adanya donatur dalam pendanaan peserta pilkada," ujar Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango di Manado, Kamis (5/11).

Bahkan, kata dia, pembiayaan oleh sponsor tidak hanya terbatas pada masa kampanye. Karena itu, dia mengingatkan cakada cermat atas kepentingan ekonomi donatur yang mensponsori dalam pilkada serentak.

Sumbangan donatur yang kebanyakan adalah pengusaha, Nawawi mengatakan, yang mempunyai konsekuensi pamrih untuk mendapatkan kemudahan perizinan dalam menjalankan bisnis.

Selanjutnya, keluasaan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan bisnisnya.

Survei KPK di 2018 itu, kata dia, bertanya kepada cakada, apakah orang yang menyumbang atau donatur ini mengharapkan balasan di kemudian hari saat para cakada menjabat?

"Jawabannya, sebagian besar cakada atau sebesar 83,80 persen dari 198 responden menyatakan akan memenuhi harapan tersebut ketika dia menjabat," lanjut pria yang lahir dan besar di Kota Manado itu.

Nawawi menambahkan, KPK harus ikut-ikutan bicara mengenai pilkada yang

berintegritas karena dilatarbelakangi beberapa hasil penelitian yang dilakukan pada kegiatan Pilkada yang berlangsung di antara 2015, 2017, dan 2018.

KPK memiliki enam tugas pokok tugas pencegahan (melakukan tindakan-tindakan yang berusaha mencegah timbulnya tindak pidana korupsi), koordinasi, monitoring, supervisi, selanjutnya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, serta melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

"Paling tidak ada empat tugas utama KPK yang relevan dengan keikutsertaan KPK soal pilkada yang berintegritas," katanya.

KPK, Pemerintah Provinsi Sulut, Bawastu, dan KPU menggelar pembekalan calon kepala daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) secara daring/ luar jaringan di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut. (antra/*)



Yusril: Wajar Presiden tidak Baca yang Ditandatangani

EXPOSEMEDIA, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) periode 2004-2007, Yusril Isha Mahendra, menganggap wajar seorang presiden tidak membaca apa yang ditandatanganinya, termasuk dalam meneken sebuah rancangan undang-undang (RUU) agar berlaku menjadi UU baru.

Dia pun mengingat kala masih menjadi asisten Mensesneg Moerdiono kala pemerintahan Presiden Soeharto.

Yusril yang dikenal sebagai pakar hukum tata negara sudah bekerja di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg) sejak 1992. Meski begitu, Yusril mengakui, era Soeharto tidak pernah ada UU yang sudah disahkan, bermasalah akibat lolos dari koreksi orang Kemensekneg.

"Saya datang ke rumah Pak Harto, saya mengatakan Pak ini yang mau ditandatanganinya, ini begini. 'Ril, ini surat isinya apa?' Lalu saya terangkan. 'Sudah bener isinya?' Sudah Pak. 'Itu Moerdiono sudah paham?' Sudah Pak. Itu sudah ada. 'Gak salah lagi?' Ndak Pak. 'Ya sudah, sini saya teken,'" kata Yusril menceritakan pengalaman bertemu Soeharto ketika meneken sebuah RUU menjadi UU dalam perbincangan dengan Rahma Sarita bertema 'I Don't Read What I Sign, Itu Hal yang Biasa!! di akun Youtube Realita TV, dikutip Jumat (6/11).

Yusril pun berkesimpulan seorang presiden tidak harus membaca dulu dokumen yang akan ditandatanganinya.

"(Presiden Soeharto) Baca aja enggak, tapi kepercayaan itu membuat saya ngeri. Saya pikir, lho beliau ini percaya sekali sama saya. Kalau sekali saja saya salah, sekali saja berkhianat, habis saya. Dan alhamdulillah sampai Pak Harto meninggal. Alhamdulillah saya tak pernah melakukan kesalahan apapun pada beliau," ucap Yusril.

Menurut Yusril, modal kepercayaan itulah yang terpenting dalam menyelenggarakan pemerintahan.

"Walaupun itu dari partai-partai yang berbeda masuk dalam pemerintahan. Tapi ketika masuk dalam pemerintahan harus merasa satu. Harus saling menjaga, harus saling melindungi satu dengan yang lain," kata Jokowi.



Terkait dengan pengesahan UU Cipta Kerja yang bermasalah, termasuk bunyi Pasal 6, Yusril menganggap bukan semata kesalahan Mensesneg Pratikno. Apalagi, selama ini Pratikno merupakan orang kepercayaan Presiden Jokowi, karena keduanya sama-sama berasal dari UGM.

"Kalau Pak Pratik saya percaya beliau, beliau bukan orang partai, orang profesional dan mungkin dari dulu sudah sahabat dengan Pak Jokowi itu saling menjaga kepercayaan," Yusril menambahkan,

"Praktik i dont read what I sign wajar, tidak mungkin presiden membaca undang-undang sebegitu banyak untuk disahkan menjadi undang-undang, karena memang kalau dibaca pun bukan ilmunya. Sama kayak saya pergi ke dokter, harus dioperasi prosedur begini harus tanda tangan, saya baca tidak paham-paham," kata Yusril memberi perumpamaan.

Dia juga mengenang ketika menjadi asisten mantan perdana menteri Mohammad Natsir (17 Juli 1908-6 Februari 1993), yang dikenal sebagai tokoh Masyumi.

Menurut dia, pernah dalam suatu ketika Natsir buru-buru tanda

tangan di kertas, dan malah isi suratnya diketik kemudian.

Belajar dari hal itu, Yusril tidak masalah jika Jokowi tak membaca UU yang ditandatanganinya.

"Kalau presiden tidak bisa apa yang ditandatanganinya itu bisa saja terjadi. Bahkan saya pernah dengan Pak Natsir walaupun bukan pejabat lagi, itu saking buru-burunya 'Yusril ambil kertas kamu teken, nanti saya ketik isinya'. Bayangkan itu ga ada isinya, diteken surat itu ditujukan kepada Tengku Abdulrahman, Bapak Pendiri Negara Malaysia pada waktu itu kira-kira tahun 80-an."

Sebelumnya, Mensesneg Pratikno menyebut, sejumlah kesalahan yang ditemukan di dalam UU Cipta Kerja merupakan masalah teknis administratif. Sehingga, kesalahan teknis tersebut tak akan berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja.

"Hari ini kita menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja," ujar Pratikno kepada wartawan, Selasa (3/11). **(REPUBLIKA)**

Mayoritas Rakyat AS Tolak Deklarasi Kemenangan Trump

EXPOSEMEDIA, MANADO — Sebagian besar rakyat Amerika Serikat yang merupakan representasi dari Partai Republik dan Partai Demokrat tidak menerima deklarasi kemenangan prematur Presiden Donald Trump dalam Pemilu tahun ini.

Mereka bersedia menunggu semua suara dihitung sebelum memutuskan siapa yang menang, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dirilis Kamis.

Survei 4-5 November juga menunjukkan publik sebagian besar mengesampingkan penilaian Trump tentang adanya kecurangan dalam hasil Pemilu. Perolehan suara Presiden Trump membuntuti perolehan suara calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden di Arizona dan Nevada.

Keunggulan perolehan suara Trump di Pennsylvania dan Georgia terus menyusut ketika negara bagian itu menghitung surat suara yang masuk. Saat jalannya menuju kemenangan menyempit pekan ini, Trump mengeluh tanpa bukti bahwa dia adalah korban penipuan pemilih yang meluas.

Trump menegaskan dia harus berada di posisi pertama di sebagian besar negara bagian yang masih menghitung suara. Ia mengumumkan kemenangan sebelum waktunya dalam pidato pagi yang bertele-tele yang salah membaca penghitungan suara di seluruh negeri.

Menurut jajak pendapat tersebut, hanya sedikit orang Amerika yang setuju dengan pandangan presiden tentang Pemilu: 16 persen orang dewasa AS, termasuk tujuh persen dari Demokrat dan 30 persen dari Republik, menerima deklarasi kemenangan Trump.

Sebanyak 84 persen lainnya, termasuk 93 persen dari Demokrat dan 70 persen dari Republikan, mengatakan para kandidat calon presiden tidak boleh mengumumkan kemenangan sampai semua suara dihitung. Dua pertiga orang Amerika mengatakan mereka meyakini pejabat pemilihan lokal bekerja dengan jujur.

Sebanyak 83 persen setuju bahwa "demokrasi kita dapat bertahan menunggu sampai semua suara dihitung untuk mengetahui siapa yang memenangkan pemilihan".

Jajak pendapat Reuters/Ipsos dilakukan secara daring, dalam bahasa Inggris, di seluruh Amerika Serikat. Jajak pendapat mengumpulkan pendapat dari 1.115 orang dewasa AS, termasuk 524 Demokrat dan 417 Republik. Jajak pendapat memiliki interval kredibilitas, ukuran perseri, sekitar enam poin persentase. (Reuters)



VOTE PRESIDEN AS Joe Biden Menuju Gerbang White House

EXPOSEMEDIA, MANADO — Calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden berhasil menembus rekor suara terbanyak dalam Pilpres Amerika Serikat 2020.

Mengutip penghitungan The Guardian per Kamis (5/11) pukul 13.05 WIB, Joe Biden mengantongi 72.071.454 suara.

Angka ini melebihi rekor sebelumnya yang diraih mantan presiden AS, Barack Obama. Pada Pilpres 2008, Obama mengumpulkan 69.498.516 suara dengan jumlah penduduk saat itu berkisar di angka 304,1 juta menurut data sensus AS.

Jumlah sensus terbaru di tahun 2019 menunjukkan angka penduduk di AS meningkat menjadi 328,2 juta orang.

Sedangkan di sisi Partai Republik, Donald Trump mengumpulkan 68.598.918 suara sejauh ini. Penghitungan masih terus dilakukan di sejumlah negara bagian.

Penghitungan sementara pilpres sendiri masih menggunakan Biden dengan 264 suara elektoral. Meninggalkan Trump dengan 214 suara elektoral. Pertarungan antara keduanya semakin panas sejak Biden

berhasil membuat Arizona, Wisconsin dan Michigan beralih ke Partai Demokrat.

Mengutip Washington Post, angka partisipasi pilpres AS sejauh ini terpantau tinggi, khususnya jika dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya.

Meskipun masih ada suara yang belum terhitung, sejauh ini angka partisipasi Pilpres 2020 sudah mencapai 60 persen.

Partisipasi tahun ini ditargetkan mencapai 66,1 persen dari total populasi.

Partisipasi pilpres tertinggi di AS tercatat pada 1960 dengan 63,8 persen, disusul 1964 dengan 62,8 persen dan 1968 dengan 62,5 persen. Pada pilpres 2016, partisipasi hanya mencapai 60,1 persen.

Jika tahun ini angka partisipasi terus meningkat signifikan, kemungkinan pilpres yang melombakan Trump dan Biden bakal menjadi pemilihan dengan angka partisipasi tertinggi di abad 20. (Cnni/*)



Seorang petugas pemilu memeriksa tanda tangan pada surat suara yang masuk dan untuk kelidibereasan di pusat pemrosesan surat suara di Los Angeles County Registrar/Recorders di Pomona Fairplex di Pomona, California, AS, 02 November 2020.

Hariyanto: Paslon yang Terbukti Politik Uang Bakal Didiskualifikasi

EXPOSEMEDIA, BOLTIM — Dugaan money politic yang dilakukan, oleh salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) untuk pada warga setempat.



Pimpinan Bawaslu Boltim Hariyanto

Dikatakan Pimpinan Bawaslu Boltim Hariyanto, walaupun, yang di video itu yang indikasi menjanjikan memang sudah kelihatan.

Akan tetapi, perbuatannya belum terjadi dan itu masuk kategori menjanjikan. Jadi sikap Bawaslu secara kelembagaan itu sudah dilakukan penulsuran. Tentu, pintu masuk Bawaslu yang ditemukan langsung atau yang dilaporkan masyarakat.

"Dalam rangka penanganan dugaan pilkada, apalagi tindak pidana pemilu. Kalau, terkait dengan video yang beredar itu, Bawaslu masih melakukan penulsuran, kalau ada masyarakat melihat langsung silakan dilaporkan secara resmi ke Bawaslu," Kata Hariyanto saat dikonfirmasi Harian Manado.

Lanjutnya, untuk itu harus dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten. Sebab, disitu ada Sentra Gakkumdu yang akan memproses dugaan tindak pidana pemilihan.

Dan, berharap pelaporan tersebut yang terlalu lama dan ketentuannya setelah diketahui atau kejadian berlangsung dikarenakan 7 hari batasan waktunya.

"Untuk itu, kalau pun tidak dilaporkan selama 7 hari, itu sudah kadaluarsa. Jadi, silahkan laporkan agar, mempunyai bukti-bukti yang ada nantinya akan ditangani oleh Sentra Gakkumdu. Selain itu, kalau terbukti, misalnya kasus itu sudah dilaporkan kemudian terproses. Dan itu ada pasal yang terkait dengan pidana," ungkapnya.

Akan tetapi kalau ada praktik money politic, selain pidana ada juga efek administrasi. Nah, efek administrasi yakni medifikualifikasi calon kalau misalnya calon terbukti melakukan itu.

"Jadi, selain sanksi pidana, ada juga sanksi administrasi kalau menyangkut money politic, dan saya belum menyebutkan pasal-pasal sebab itu ranah kajian Gakkumdu," bebernya.

Sementara itu, Oskar Manoppo mengatakan, kalau dipihak kami tentu tidak ada janji untuk memberikan uang, tentu pada prinsipnya tidak ada.

"Kalau pun, ada kejadian yang mana dilakukan, money politic sampai sekarang kronologisnya saya belum mengetahui," jelasnya (ham/rin/*)



EXPOSEMEDIA MERAWAT AKAL SEHAT

HAJIR sebagai Ketua Digital Pertama di Sulawesi Utara, EXPOSEMEDIA.ID menjawab keinginan pembaca yang melek teknologi gadget dan smartphone. Dengan EXPOSE MEDIA.ID anda bisa membaca berita secara akurat dimana saja dan kapan saja.

KEREDAKSIAN DI BAWAH MANAJEMEN:
PT PRATAMA DIGITAL MEDIA

MANAGER ADVERTISING:
Hadi Prestasi, Mirdad Hasan

PENASIHAT HUKUM: **Pranoto & Partner**
Law Firm

PEMIMPIN REDAKSI:
Azzarin Razak
 (Wartawan Utama)

REDAKTUR:
Amas Machmud, Saleh Nggu

PERWAKILAHAN/LAYOUT:
Syanuddin Hasan, Theot

IT & WEB PROGRAMMER:
Ehiet

REPORTER/ KONTRIBUTOR :

Korda Minahasa Raya dan Bolmong Raya: **Benyamin Ali, Douglas Panit (Mirusel), Hamdan Rahman Miu (Ihsael), Firmansyah Hiliputo (Gorontalo), Reporter: Mulyadi Pontorewing**

Kristen Stewart
**Jadi Lesbian
 Sejak Umur
 21 Tahun**

EXPOSEMEDIA — *Aktris cantik Kristen Stewart semakin terbuka soal seksualitasnya. Wanita berusia 30 tahun ini telah mengumumkan bahwa ia merupakan seorang penyuka sesama jenis atau lesbian beberapa waktu lalu.*

Namun, ia akhirnya mau buka-bukaan soal kehidupan seksualitasnya, di mana ia mengaku telah berkenan dengan seorang gadis di usia muda.

"Pertama kali aku berkenan dengan seorang gadis, aku langsung ditanya apakah aku lesbian," ucap bintang *Panic Room* itu, dikutip dari laman *Daily Mail*, Jumat, 6 November 2020.

"Dan itu seperti, 'Ya Tuhan, saya berumur 21 tahun,'" katanya.

Ternyata, kala itu ia tak suka dicap sebagai seorang lesbian. Bukan karena malu, tapi ia merasa tak perlu memberikan label pada dirinya sendiri untuk publik.

"Saya merasa mungkin ada hal-hal yang menyakiti orang yang pernah bersama saya. Bukan karena saya merasa malu menjadi gay secara terbuka, tetapi karena saya tidak suka memberikan diri saya kepada publik. Rasanya seperti pencurian," ujarnya.

Dia juga menambahkan bahwa dia sadar dia tidak terbuka tentang seksualitasnya saat itu. Apalagi ia pernah menjalin hubungan asmara dengan sejumlah pria, seperti Robert Pattinson, Michael Angarano dan mendiang Anton Yelchin.

Hubungan asmaranya dengan wanita yang pertama kali tercium media adalah dengan Alicia Cargile. Mereka berpacaran dari 2014 hingga 2016.

"Ini adalah periode waktu ketika saya agak cerdik. Bahkan dalam hubungan saya sebelumnya, yang jujur, kami melakukan semua yang kami bisa agar tidak difoto melakukan sesuatu, hal-hal yang tidak akan menjadi milik kami," jelas Kristen Stewart.

Setelah Alicia, dia juga diketahui menjalin hubungan asmara dengan Soko (2016), St Vincent (2016), Stella Maxwell (2016 hingga 2019) lalu Sara Dinklin (2018 hingga 2019).

Saat ini ia sudah setahun menjalani hubungan asmara serius dengan penulis skenario Dylan Meyer.

"Jadi saya pikir tekanan tambahan untuk mewakili sekelompok orang, mewakili keanehan, bukanlah sesuatu yang saya pahami saat itu. Baru sekarang saya bisa melihatnya," kata dia.

Mantan bintang cilik itu juga berbicara mengenai pengalamannya memerankan karakter unik di layar. Karyanya yang paling terkenal adalah di *Charlie's Angels*. Beberapa kali pertama saya memainkan karakter unik, saya belum terbuka sebagai lesbian.

Saya tertarik pada cerita dan orang-orang karena suatu alasan, dan saya pikir, secara alami, saya mewakili apa yang saya perjuangkan," kata bintang *Twilight* itu.

Menurut saya, penting bagi kita untuk mengambil peran yang berbeda dan berada di posisi orang lain untuk benar-benar mengembangkan diri kita sendiri," tutupnya. (YA)



Rumor Transfer: Harganya Didiskon MU, Pogba Menuju Real Madrid?

EXPOSEMEDIA, MANCHESTER — Manchester United kabarnya menurunkan harga jual Paul Pogba. Rumor gelandang Prancis itu menuju Real Madrid pun menguat lagi.

Bukan rahasia lagi jika Madrid begitu menginginkan Pogba. Sejak tahun lalu, Los Blancos sudah diberitakan bakal berusaha merekrutnya.

Pogba sendiri juga sudah memberi isyarat tertarik pindah ke Spanyol, dengan mengatakan bermain di Madrid adalah impiannya. Namun, pemain termahal Setan Merah itu pada akhirnya masih bertahan di Inggris.

Ada rumor, kesulitan Madrid merekrut Pogba karena harga yang masih terlampau mahal dipatok MU. Sebelumnya, Setan Merah kabarnya mematok harga di atas 100 juta euro untuk pemainnya.

Kini, beredar laporan MU siap memangkas harga sang pemain. Menurut AS, MU kabarnya akan mematok harga 53 juta euro saja untuk pemain yang membawa Prancis juara Piala Dunia 2018 itu.

Selain itu, MU kabarnya siap melepas Pogba pada musim panas 2021. Artinya, raksasa Liga Inggris itu siap melego bintangnya lebih cepat, dari kontraknya yang baru akan habis pada 2022.

Saat ini, Pogba sendiri masih menjadi pilihan utama MU di lini tengah, bersama Bruno Fernandes. Namun, posisinya bisa terancam oleh Donny van de Beek, yang baru direkrut pada musim panas ini.

Situasi itu jelas membuat Madrid kembali berpeluang merekrut Pogba. Sebab, selain Eden Hazard yang sudah direkrut, Pogba menjadi salah satu pemain impian Zinedine Zidane.

Selain Pogba, Madrid juga kabarnya masih memburu Kylian Mbappe. Penyerang Paris Saint-Germain itu juga kerap dirumorkan menuju Santiago Bernabeu sejak lama. ([sport.detik](#))

